



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(Perubahan Renstra)
2021 – 2026**

**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jalan Pangeran Diponegoro No. 157 Dumai – Riau
Telp/Fax 0765 -439159**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitiandan Pengembangan Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026. Dalam Perubahan Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Perubahan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

a.n WALIKOTA DUMAI

KEPALA DPPKB KOTA DUMAI,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas,Fungsi dan struktur organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya OPD	16
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	37
3.2 Telaahan Visi-Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD.....	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	98
BAB VIII PENUTUP	99

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2021-2026. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan untuk segera melakukan revisi terhadap indikator sub kegiatan dan target indikator sub kegiatan karena kodefikasi dan nomenklatur yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adanya dinamika perubahan kebijakan dan regulasi terkait perencanaan

dan penganggaran khususnya urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana baik di tingkat Pusat, Provinsi Riau dan Kota Dumai menyebabkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah disusun dan ditetapkan sudah tidak relevan atau tidak selaras lagi dengan kebijakan tersebut di atas, Apabila Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah disusun dan ditetapkan sudah tidak relevan atau tidak selaras lagi, maka akan sulit untuk melakukan pengukuran kinerja. Oleh sebab itu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan kebijakan dan regulasi yang berlaku saat ini. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, perencanaan dan penganggaran pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Pusat, Provinsi dan Kota Dumai.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Dumai Nomor 00 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

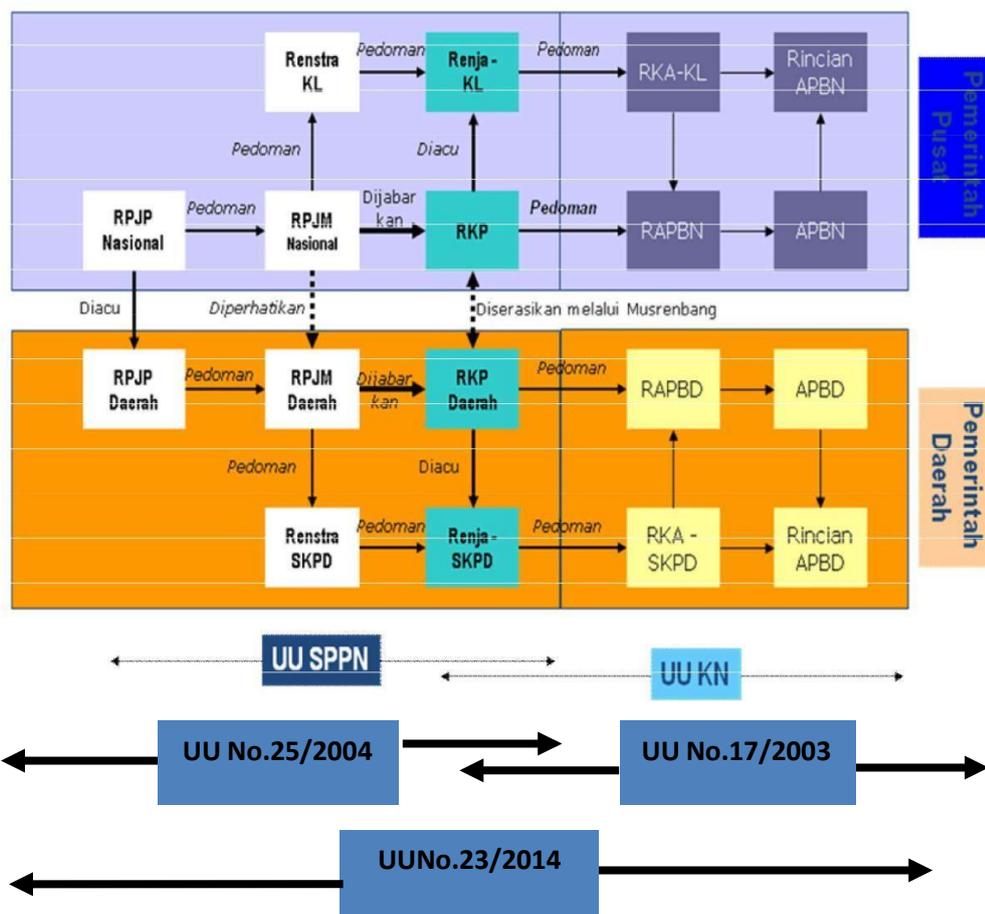
Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan

pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpedoman pada RPJMD Kota Dumai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Hal ini memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinrah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - i. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;
- o. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/Per/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
- t. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

- u. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D
- v. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai memiliki maksud untuk memberikan arah pada penyelenggaraan program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Periode 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) oleh program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategik (Perubahan Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Perubahan Renstra SKPD, fungsi Perubahan Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra SKPD, keterkaitan Perubahan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan Perubahan Renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, dalam mencapai misi yang telah ditetapkan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan mengenai Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai yang sebelumnya bernama Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai terdapat pada BAB II Pasal 2 Poin 4. Jumlah Program 11 dan terdiri dari 12 Kegiatan sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah 8 Program dan terdiri dari 17 Kegiatan. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera. Secara demografi dinas ini bertujuan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program Keluarga Berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merupakan Perangkat Daerah yang menunjang dalam mencapai Misi II yaitu ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu”*** Misi ini akan ditempuh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat. KB mendidik dan mengarahkan masyarakat untuk memiliki perencanaan dalam keluarga, perencanaan usia ideal perkawinan bagi remaja, jarak ideal melahirkan, jumlah anak hingga pada perencanaan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi keluarga. Hakikat

program KB selain membentuk opini publik dalam mewujudkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera terlebih lagi pada upaya memutuskan garis kemiskinan bagi generasi penerus. Kondisi kehidupan kurang mampu dengan melahirkan banyak keturunan anak maka tentu dapat mewariskan generasi yang kurang mampu. Melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (**Bangga Kencana**) menjadi dan mendukung Program Prioritas Nasional. Keluarga Berencana telah terbukti dapat memutus rantai kemiskinan dan keterpurukan peran perempuan dalam pembangunan, mencegah kejadian stunting melalui pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif dan pengasuhan gizi bagi baduta serta mendukung gerakan masyarakat sehat. Dengan kekuatan dan kedekatan sosial para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dengan keluarga-keluarga Indonesia, kegiatan yang bersifat penyuluhan, edukasi dan pembinaan dapat dilakukan dengan baik. Kampung KB telah terbentuk di seluruh Kabupaten/ Kota. Tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Hal ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya stunting melalui upaya perubahan pola asuh anak dalam keluarga.

Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya pendidikan, rendahnya daya beli dan permasalahan sosial lainnya. Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan program KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui pemakaian alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang akan berdampak pada angka kelahiran. Pelayanan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan membawa kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 56 Tahun 2016, dinas ini mempunyai tugas untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya.
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT.
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas - tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. **Sekretariat**

Bertugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.

Sekretariat terdiri dari :

a. *Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset*

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

b. *Subbagian Tata Usaha*

Bertugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

3. **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ditingkat daerah.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:

a. *Seksi Advokasi dan Penggerakan*

Bertugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang advokasi dan penggerakan.

b. *Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

c. *Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar dan prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

4. **Bidang Keluarga Berencana**

Bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga

berencana ditingkat daerah.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

a. *Seksi Pengendalian dan Pendistribusian*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di tingkat daerah.

b. *Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana di daerah.

c. *Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang ini mempunyai Seksi yaitu :

a. *Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.

b. *Seksi Bina Ketahanan Keluarga*

Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

c. *Seksi Bina Ketahanan Remaja*

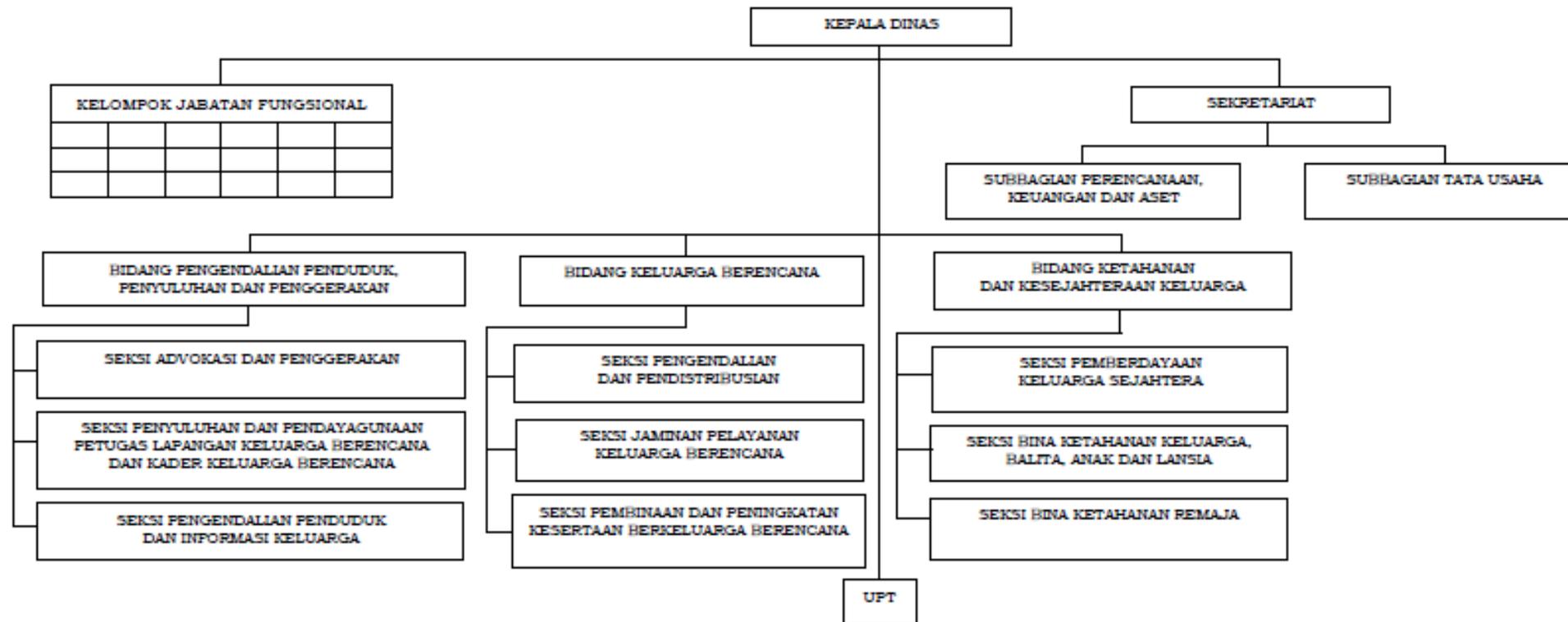
Bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

2.2 SUMBER DAYA OPD

Sumber daya yang dimiliki oleh sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

- Sarana dan Prasarana
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pembiayaan

Sumber Daya Manuasia (Aparatur)

N O	KEPANGKAT AN	GOLONGA N/RUANG	PENDIDIKAN			JUMLAH
			D3	S1	S2	
1	Pembina Utama Muda	IV.b			1	1
2	Pembina	IV.a		2	2	4
3	Penata Tk. I	III.d		4		4
4	Penata	III.c	3	5	1	9
5	Penata Muda Tk. I	III.b	3	2		5
6	Penata Muda	III.a		2		2
7	Pengatur	II.c	2			2

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai dalam melaksanakan tupoksinya memiliki asset berupa gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah tersedia sarana dan prasarana dengan gambaran jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik sebagai berikut:

Aku n	Kelompo k	Jeni s	Obje k	NAMA BIDANG BARANG	JUMLA H BARA NG	KETERANG AN
1	2		3	4	5	7
1	3	1		JENIS ASET TETAP - TANAH	1	
1	3	1	01	Tanah	1	
1	3	2		JENIS ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	670	
			01	Alat Besar		
			02	Alat Angkutan	24	
			03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	
			04	Alat Pertanian		

Aku n	Kelompo k	Jeni s	Obje k	NAMA BIDANG BARANG	JUMLA H BARA NG	KETERANG AN
			05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	504	
			06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	17	
			07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	35	
			08	Alat Laboratorium		
			09	Alat Persenjataan		
			10	Komputer	68	
			11	Alat Eksplorasi		
			12	Alat Pengeboran		
			13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
			14	Alat Bantu Eksplorasi		
			15	Alat Keselamatan Kerja		
			16	Alat Peraga	21	
			17	Peralatan Proses/Produksi		
			18	Rambu - Rambu		
			19	Peralatan Olah Raga		
1	3	3		JENIS ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN	13	
			01	Bangunan Gedung	13	
			02	Monumen		
			03	Bangunan Menara		
			04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1	3	4		JENIS ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	
			01	Jalan dan Jembatan		
			02	Bangunan Air		
			03	Instalasi		
			04	Jaringan	1	
1	3	5		JENIS ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA	0	
			01	Bahan Perpustakaan		
			02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga		
			03	Hewan		
			04	Biota Perairan		
			05	Tanaman		
			06	Barang Koleksi non Budaya		
			07	aset Tetap Dalam Renovasi		
1	3	6		JENIS ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	0	
			01	Konstruksi Dalam Pekerjaan		
1	3	7		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	
			01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
			02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
			03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
			04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
1	5			JENIS - ASET LAINNYA	1	
1	5	2	01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud		
1	5	4	01	Aset Lain-Lain (ARB)	1	

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	5	5	01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	
1	5	6	01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	
TOTAL					686	

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Kemampuan untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sangat tergantung dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang mendukung pelaksanaan program KB, yaitu :

- ⇒ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) PNS : 5 Orang
Ditunjuk Sebagai Koordinator diKecamatan
- ⇒ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Outsourcing : 14 Orang
Dibagi atas penanggung jawab pada Kelurahan
- ⇒ Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) : 33 Unit
Tersebar pada setiap Kelurahan di Kota Dumai

Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkedudukan sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang merupakan amanat dalam RPJMN 2020-2024, yang salah satu agenda pembangunan nasionalnya adalah “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan melalui 4 Program: (1) Program Keluarga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dan (4) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, Ini semua dilaksanakan agar selaras dan seimbang dengan pembangunan Kota Dumai di segala bidang dan aspek kehidupan.

Guna mencapai tujuan ini secara bertahap perlu penataan kembali sendi-sendi program sampai ke lini lapangan, termasuk tata kelebagaannya, dan mempertahankan kelangsungan program yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat melalui pemantapan komitmen segenap stakeholder di semua tingkatan. Pembangunan SDM berkualitas sangat penting dilakukan, karena betapapun giat-giatnya kita melaksanakan pembangunan di berbagai bidang namun bila tidak diimbangi SDM berkualitas akan membawa hasil yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, karena pada hakekatnya pembangunan itu bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir batin.

Oleh karena itu, agar penduduk dapat menjadi aset pembangunan, maka harus dikelola dengan baik dalam arti kualitas maupun kuantitasnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan terdapat tiga aspek penting yang benar-benar harus diperhatikan yaitu :

1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi
2. Aspek Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Aspek Pengelolaan pertumbuhan Penduduk

Dalam kurun waktu 2016-2021 beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai , diantaranya penyelenggaraan gambaran capaian kinerja urusan Keluarga Berencana.

Menurut data DALLAP Kota Dumai Tahun 2020, Jumlah Akseptor KB Aktif di Kota Dumai berjumlah 35.923 Jiwa dengan rincian alat kontrasepsi berupa IUD (2.000), MOW (1.536), MOP (67), Implant (4.556), Suntikan (17.361), Pil (7.696) dan Kondom (2.707).

Pembiayaan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk ikut menentukan keberhasilan pembangunan terutama di bidang KB. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk pembangunan daerah.

Pembiayaan pembangunan keluarga berencana merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk ikut menentukan keberhasilan pembangunan

terutama di bidang KB. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk pembangunan daerah.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan hasil DALLAP Tahun 2020 sebanyak 47.575 pasangan dari jumlah WUS yang ada.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kota Dumai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio akseptor KB				1 : 47,7	1:48,7	-	-	-	1 : 50	1 : 69,76								
2	Cangkupan peserta KB aktif				62,5	65	-	-	-	64,31	69,79								
3	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)				2,078	2,076	2,074	2,072	2,070			1,08	1,78	1,70			147,83	116,40	121,76
4	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)				60,64	61,76	61,9	62,1	63,2			69,02	71,90	75,50			111,47	115,78	119,46
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)				20,8	19,8	18,8	18,70	18,60			18,36	16,20	13,20			97,66	115,43	140,91

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				-	10	15	20	25			20 Institusi	30 Institusi	35 Institusi			133,33	150,00	140,00

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kota Dumai

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Keluarga Berencana																	
	Pelayanan KIE		208.80 0.000	393.79 8.000				208.42 8.000	336.43 0.491									
	Pembinaan keluarga berencana	291.07 7.000	454.70 5.000	1.839. 842.70 0	911.55 3.750	25.838 .627	231.24 2.300	447.11 0.000	1.506. 065.80 0	897.74 9.430	25.778 .000	79, 44 %	98, 33 %	81, 86 %	98, 49 %	99, 77 %		
	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling			1.045. 000.00 0	654.59 0.000	1.123. 545.00 0			329.67 0.000	552.52 5.000	1.108. 885.00 0			31, 55 %	84, 41 %	98, 70 %		
	Pembangunan Balai Penyuluhan KB			644.00 0.000	527.41 0.000				643.22 0.000	515.41 8.000				99, 88 %	97, 73 %			
	Dukungan					138.31					137.74 8.603					99, 59		

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi	
	media KIE dan manajemen BOKB					0.000												%	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja																		
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	293.25 3.850					277.27 3.000								94, 55 %				
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan																		

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	Anak																	
	Penguatan kelembagaan pengasutan gender dan anak	113.72 7.680	144.09 5.000				107.09 1.968	142.91 9.749				94, 17 %	99, 18 %					
	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	153.26 0.000	190.84 2.700				144.28 7.016	189.87 2.258				94, 15 %	99, 49 %					
	Pembinaan Lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG	134.56 9.500	173.38 0.500				132.67 8.000	172.97 8.285				98, 59 %	99, 77 %					
4	Program Pelayanan																	

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	Kontrasepsi																	
	Pengadaan alat kontrasepsi					95.298.500					80.684.118					84,66%		
	Pelayanan konseling KB					31.582.000					29.021.125					91,89%		
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	435.331.000	270.746.000	236.253.200	1.606.190.300	38.700.000	432.764.000	266.021.390	188.489.760	1.565.022.283	37.293.214	99,41%	98,25%	79,78%	97,44%	96,36%		
5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																	
	Fasilitasi pembinaan balai					537.200.000					518.768.873					96,57%		

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	penyuluhan KB																	
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR																	
	Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah		250.000.000	243.384.200	100.000.000	73.697.200		249.751.304	227.399.900	99.299.600	73.627.200		99,90%	93,43%	99,30%	99,91%		
7	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat																	

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	kat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri																	
	Fasilitas pembentukkan kelompok masyarakat peduli KB	210.400.000					207.400.000									98,57%		
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga																	
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelomp	343.750.000			598.248.100	253.138.755	339.289.000			589.012.019	251.586.736	98,70%		98,46%	99,39%			

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	ok bina keluarga di kecamatan																	
8	Program Pengendalian Penduduk																	
	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Sektor Formal/Informal dalam Pendidikan Kependudukan				267.57 7.000	51.304 .800				267.47 4.000	51.304 .700				99, 96 %	100 ,00 %		
	Advokasi KIE Program KKBPK				855.57 0.200	231.37 4.720				828.22 7.784	231.12 4.235				96, 80 %	99, 89 %		
	Peningkatan Kualitas				947.11 2.800	211.31 2.000				946.91 7.240	211.28 9.125				99, 98 %	99, 99 %		

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
	Petugas Lini Lapangan dalam Pelaksanaan Program KKBPK																	
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB					198.000.000					198.000.000					100,00%		
	Fasilitasi pengelolaan kampung KB					567.070.000					560.170.000					98,78%		
	JUMLAH	1.975.369.030	1.692.569.200	4.402.278.100	6.468.252.150	3.576.371.602	1.872.025.284	1.677.080.986	3.231.275.951	6.261.645.356	3.515.280.929	94,77%	99,08%	73,40%	96,81%	98,29%		

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Salah satu Tantangan dan peluang Rencana Strategi (Perubahan Renstra) Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat dan Rencana Startegi (Perubahan Renstra) Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan telaan terhadap RTRW dan Kota Dumai yang berimplikasi terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat HLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pembangunan BangsaKecana pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan RT/RW dan KLHS dimana dalam hal pengendalian penduduk ada 5 Aspek yang dinilai yaitu :

1. Aspek Pengendalian kuantitas penduduk, arahnya adalah pada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan keluarga berkualitas melalui upaya pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas
2. Aspek Peningkatan kualitas penduduk, diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya

3. Aspek Pembangunan Keluarga, dilakukan melalui rekayasa sosial melalui penataan struktur keluarga, penguatan relasi sosial keluarga, pengembangan tranformasi sosial keluarga dan perluasan jaringan sosial keluarga
4. Aspek Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dilakukan melalui :
 - Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan
 - Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
 - Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah
 - Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa dan
 - Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal
5. Aspek Penataan administrasi kependudukan, dilakukan melalui dua hal, yaitu 1. Penataan dan pengelolaan database kependudukan, dan; 2. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RTRW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terapat keterpaduan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (**Bangga Kencana**) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Kampung KB bukan hanya melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, namun juga melibatkan seluruh Dinas intansi terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran, perbatasan, terpencil dan wilayah nelayan.

Ruang lingkup pelaksanaan kampung KB, antara lain Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Kampung KB bertujuan untuk : mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan koordinasi lintas sektor. terdapat beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Nantinya Kampung KB ini dapat di terapkan dari segala aspek kehidupan diantaranya Bidang Agama, meningkatnya kesadaran masyarakat dibidang keagamaan seperti Pengajian, shalat berjamaah di mesjid, dan dibentuknya Ikatan Remaja Mesjid atau Bidang Sosial Budaya, yaitu adanya sosialisasi bahasa Ibu kepada masyarakat. Khususnya pada bidang Reproduksi yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi kesehatan Reproduksi kepada remaja oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan serta dibentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB. untuk Bidang Ekonomi yaitu dibentuknya kelompok UPPKS dan Kelompok Wanita yang berwirausaha serta di Bidang Lingkungan, yaitu dilakukan pemanfaatan pekarangan rumah, Pengelolaan sampah dimulai dengan pemisahan sampah organik dan anorganik serta di buatnya Bank sampah yang dikelola oleh remaja pengurus PIK-R di kampung KB.

Dalam meningkatkan kegiatan di kampung KB, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk kesinambungan kegiatan dan tercapainya cita-cita kampung KB sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah pinggiran dan terpencil.

Analisis terhadap Perubahan Renstra OPD Kabupaten dan Kota, secara umum untuk Kabupaten dan Kota yang telah melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, telah memasukan kedalam Perubahan Renstra masing-masing, karena salah satu indikator Kinerja yang harus dicapai adalah Menurunnya laju pertumbuhan penduduk di setiap Kabupaten dan Kota.

Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai untuk mewujudkan dalam kurung waktu Perubahan Renstra ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral;
- b. Masih rendahnya komitmen dan motivasi aparatur DPP&KB untuk menghasilkan suatu output yang berkualitas;
- c. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah;
- d. Masih kurangnya sarana pendukung kerja sehingga kurangnya pengadvokasian ke masyarakat dan Lintas sektor
- e. Minimnya Aparatur pelayanan administrasi dan petugas lapangan;

- f. Masih minimnya inovasi aparatur untuk menggali potensi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pelayanan KB;
- g. Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk melaksanakan program bangga kencana;
- h. Masih kurangnya jumlah tenaga Penyuluh dilapangan dan Mitra kerja dalam kegiatan kampung KB
- i. Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah Daerah
- j. Masih kurangnya Pelatihan untuk tenaga lini lapangan dan lintas sektor dalam peningkatan kualitas program BanggaKencana
- k. Kurangnya sinkronisasi dan pembaharuan data di lintas program

Peluang

- a. Semakin tingginya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung program Banggakencana;
- b. Semakin tingginya semangat aparatur DPPKB untuk memberikan penyuluhan yang berkualitas;
- c. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas mampu dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur berkorelasi positif terhadap semakin meningkatnya kesertaan ber KB.
- e. Semakin banyak anggaran yang tersedia maka semakin mendukung kegiatan program BanggaKencana
- f. Semakin tepat rasio Penyuluh di wilayah maka semakin maksimal dalam pencapaian Program
- g. Semakin maksimalnya dilaksanakan pertemuan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas program BanggaKencana
- h. Semakin banyak komitmen dari lintas sector maka semakin tinggi pencapaian program Banggakencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya;
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai merupakan salah satu instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas pembangunan keluarga untuk seluruh penduduk Kota Dumai dengan jenis pelayanan.

1. Pelayanan MKJP dan non MKJP
2. Pembinaan ke IMP dan beberapa lintas sektor terkait dalam peningkatan kualitas program BangsaKencana
3. Pelayanan distribusi alokon
4. Pelayanan di 4 moment besar termasuk pada hari sejuta akseptor dan hari kontrasepsi sedunia

5. Pembinaan terhadap kelompok kegiatan (BKB, BKL, BKR, PIK R, UPPKA)
6. Pembinaan di Sekolah Siaga Kependudukan dan Kampung KB

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Beberapa faktor seperti jumlah tenaga pelayan masih yang belum mencukupi, sarana transportasi untuk operasional yang masih kurang, anggaran yang belum optimal, belum ada Juknis yang mengatur program kegiatan secara terinci dan belum dimaksimalkannya kemitraan yang ada menjadi masalah yang kompleks didalam serta memberikan pelayanan Program Bangga Kencana kepada masyarakat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Sehingga perlu di cari solusi yang efektif dan efisien agar tercapainya pelayanan yang maksimal, antara lain :

1. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tenaga bertambah, dan tingkat kesulitan untuk menjangkau daerah sulit berkurang dengan sarana transportasi yang tersedia.
2. Dengan adanya kerjasama dan kemitraan diharapkan program kerja akan terealisasi secara optimal.
3. Dengan perkembangan IPTEK diharapkan Informasi dan data akan dapat diperoleh lebih akurat dan akuntabel.
4. Dengan otonomi daerah diharapkan peningkatan anggaran untuk Program Kerja di Bidang PP dan KB.
5. Menyediakan tenaga, sarana, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pelayanan KB.
6. Mengoptimalkan penggunaan anggaran bagi mendukung PEMDA terhadap pembangunan masyarakat khususnya keluarga.
7. Tersedianya juknis bagi program kerja Dinas PP dan KB agar lebih terarah dan terakomodir.
8. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan dalam mendukung kinerja Dinas PP dan KB.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
1	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kurang terpenuhinya sarana prasarana berupa komputer dan jaringan internet di gudang alkon	Pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi menggunakan aplikasi yang hanya bisa dibuka dengan jaringan internet
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bidan di Faskes tidak semuanya mempunyai sertifikat CTU	Masih adanya bidan di Faskes yang belum kompeten melaksanakan pelayanan KB
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunkan angka unmetneed	Masih ditemukan pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi tapi tidak mau ber KB
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/kotaprogram Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Permintaan data yang tidak sesuai diberikan	Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam permintaan data
		Informasi yang diberikan masih belum di pahami masyarakat	Kurangnya pemahaman lintas sektor terhadap program Bangga kencana
5	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kurang maksimalnya melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah sehingga sekolah siaga kependudukan (ssk) ketahap paripurna belum terlaksana dengan baik	Kurangnya fasilitas di beberapa sekolah untuk pembentukan pojok kependudukan dan rpp (rencana pembelajaran)
6	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kurangnya maksimalnya pembinaan terhadap Lini Lapangan	Kurangnya pemahaman kader mengenai tugas dan fungsi masing-masing.

NO	INDIKATOR	MASALAH	AKAR PERMASALAHAN
7	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kurang maksimalnya pembinaan terhadap kader kelompok kegiatan UPPKA	Kurangnya pemahaman kader mengenai tugas dan fungsi masing-masing
			Tidak tersedianya tempat pelaksanaan kelompok kegiatan yang permanen
		Tidak berjalannya kegiatan PPKS yang sesuai dengan yang diharapkan	Kurang maksimal nya sosialisasi tentang kegiatan PPKS
8	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kurangnya pembinaan secara berkala pada kelompok BKR dan PIK-R sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal	Kurangnya pemahaman kader terhadap pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja di Kelurahan
			Kurangnya upgrading materi dan kegiatan PIK Remaja baik dari PKB, OPD dan BKKBN Provinsi
9	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kurang maksimalnya pembinaan terhadap kader kelompok kegiatan BKB dan BKL	Kurangnya pemahaman kader mengenai tugas dan fungsi masing-masing
			Tidak tersedianya tempat pelaksanaan kelompok kegiatan yang permanen

3.2 TELAAHAN VISI-MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan teknokratik Pembangunan Kota Dumai mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”*.

Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Kota Dumai yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pementapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan

tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota yang baru, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021-2026) yang memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Walikota dan Wakil Walikota dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Misi II Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu, dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Selain dari Program Prioritas yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga terdapat Program pendukung sebanyak 1 (satu) antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Perubahan Renstra DPPKB Kota Dumai adalah sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Misi 2 : Membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera	Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangsa Kencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangsa Kencana

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan diatas dipaparkan

dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat :

- o Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen
- o Wilayah yang luas
- o Tingkat pendidikan yang rendah
- o Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
- o Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi

b. Faktor Pendorong :

- o Adanya komitmen untuk mendukung program DPPKB
- o Semakin terfasilitasinya anggaran program Pengendalian dan Keluarga Berencana dari anggaran APBD Kota Dumai dan Bantuan dari APBN (DAK)
- o Adanya peraturan-peraturan Walikota Dumai untuk penunjang pelaksanaan kegiatan di DPPKB Kota Dumai.
- o Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
- o Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan

3.3 TELAAHAN PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN PERUBAHAN RENSTRA

3.3.1. Perubahan Renstra BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga terhadap tugas dan fungsi BKKBN Provinsi Riau, maka visi BKKBN Riau adalah :

Filosofi Pembangunan Daerah mengacu kepada nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya. Posisi strategis Kota Dumai ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Dumai sebagai kawasan

yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur perdagangan dan ekonomi internasional.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat Dumai yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi baik secara lokal, nasional dan regional serta dilandasi dengan nilai-nilai hakiki kebudayaan Melayu yang beradab, bermoral dan tangguh menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat Dumai maju dan mandiri, sejahtera lahir dan bathin dan beradat istiadat Melayu yang agamis sehingga untuk mewujudkan Visi Kota Dumai, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan Visi Dumai, maka ke depan Misi Pembangunan Dumai yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Pemerintahan daerah yang Profesional dan bermoral melalui keteladanan pemimpin dan aparat
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan pengetasan kebodohan
3. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar wilayah sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur
4. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perkuatan koperasi dan UKM sebagai kelanjutan pengetasan kemiskinan
5. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang mapan
6. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di perdesaan dalam pembangunan
7. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global secara terpadu dan berkesinambungan

Dengan adanya Visi dan Misi diatas, dibuat program kerja yang dapat dijadikan sebagai target keberhasilan dan acuan, antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia
3. Percepatan pembangunan

4. Ketahanan Pangan (aspek produksi, aspek distribusi, peningkatan value)
5. Peningkatan Potensi ekonomi daerah, melalui dukungan investasi dan penguatan UMKM
6. Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal serta pengembangan potensi pariwisata daerah
7. Peningkatan kualitas hidup beragama
8. Pelestarian Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan
9. Pembangunan wilayah perbatasan dan terisolir
10. Pembangunan Pedesaan dalam upaya mendorong implementasi otonomi daerah

Dengan memiliki arah kebijakan yang tertuang sehingga meningkatkan taraf layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya manusia, dengan Sasaran Program Meningkatkan kesehatan ibu dan anak menurunnya AKI & bayi serta dukungan kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

a. Faktor penghambat :

- Terbatasnya dukungan anggaran
- Terbatasnya sumber daya manusia khususnya penyuluh dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat

b. Faktor pendorong :

- Adanya kerangka acuan kegiatan
- Adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga dari pusat

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan

struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat HLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RTRW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (**Bangga Kencana**) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB bukan hanya melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja, namun juga melibatkan seluruh Dinas instansi terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran, perbatasan, terpencil dan wilayah nelayan.

Ruang lingkup pelaksanaan kampung KB, antara lain Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Kampung KB bertujuan untuk : mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan koordinasi lintas sektor. terdapat beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nantinya Kampung KB ini dapat di terapkan dari segala aspek kehidupan diantaranya Bidang Agama, meningkatnya kesadaran masyarakat dibidang keagamaan seperti Pengajian, shalat berjamaah di mesjid, dan dibentuknya Ikatan Remaja Mesjid atau Bidang Sosial Budaya, yaitu adanya sosialisasi bahasa Ibu kepada masyarakat. Khususnya pada bidang Reproduksi yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi kesehatan Reproduksi kepada remaja oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dan Dinas Kesehatan serta dibentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB. untuk Bidang Ekonomi yaitu dibentuknya kelompok UPPKS dan Kelompok Wanita yang berwirausaha serta di Bidang Lingkungan, yaitu dilakukan pemanfaatan pekarangan rumah, Pengelolaan sampah dimulai dengan pemisahan sampah organik dan anorganik serta di buatnya Bank sampah yang dikelola oleh remaja pengurus PIK-R di kampung KB.

Dalam meningkatkan kegiatan di kampung KB, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk kesinambungan kegiatan dan tercapainya cita-cita kampung KB sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah pinggiran dan terpencil.

Beberapa Faktor penghambat yang mempengaruhi Pelayanan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi permasalahan di tinjau dari Implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Untuk sukses dan tercapainya target yang telah ditentukan diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan, Dinas, Lembaga, Kantor, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan yang dipandang masih lemahnya koordinasi antar lintas sektoral sehingga memungkinkan kerjasama team work yang perlu di tindak lanjuti dalam hal segala bidang
2. Dalam pelaksanaan tugas tugas tersebut dari unsur penunjang yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai yang dirasakan masih kurang dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan keterbatasan pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai tentang TUPOKSI
3. Keterbatasan / Kurangnya tenaga Penyuluh KB dilapangan sehingga perlu penambahan Pegawai sebagai Tenaga lapangan agar tercipta suatu tujuan Badan yang efektif dan perolehan data yang relevan.

Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi permasalahan di tinjau dari Implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. **PEMANTAPAN KOMITMEN**

Sasaran yang telah dicapai dalam operasional program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu meningkatnya komitmen dari

seluruh komponen masyarakat meliputi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan PP dan KS, dengan kegiatan :

- a. Konsultasi Pengelolaan Program Tingkat Provinsi di setiap pelatihan/sosialisasi.
- b. Pemberian Penghargaan untuk PLKB Terbaik se-Kota Dumai sebagai moment untuk meningkatkan kinerja PLKB/PKB.

2. PENINGKATAN KESERTAAN BER KB

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesertaan ber KB sebagai berikut :

- a. Pemantapan Komitmen Operasional.
 1. Komitmen DPPKB Kota Dumai tentang pengembangan Bhakti IBI KB – Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan KB.
 2. Surat Edaran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/X/2010, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- b. Peningkatan Akses pelayanan.
 - a. Pelayanan KB melalui momentum Bhakti IBI, TNI KB Terpadu, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, Harganas dan momentum strategis lainnya. Kegiatan momentum telah dilaksanakan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi secara maksimal terhadap peningkatan peserta KB. Khususnya Momentum Bhakti IBI telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Peserta KB IUD.
 - b. Bhakti IBI KB – Kesehatan.

Intensifikasi pelaksanaan IBI KB – Kesehatan dilaksanakan di Kota Dumai dengan tahapan operasional kegiatan sebagai berikut :

 1. Pencanaan
 2. Pelayanan terpusat tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan

3. Monitoring dan pembinaan operasional Bhakti IBI secara berjenjang.
- c. Operasionalisasi Mobil Unit Pelayanan KB Keliling.
Pelaksanaan kegiatan TIM Mobil Unit Pelayanan KB Keliling Tingkat Kota Dumai dianggap efektif terutama untuk menjangkau kegiatan pelayanan bagi daerah yang relatif sulit di jangkau
 - d. Pelayanan Bhaksos dalam Kegiatan Momentum Kegiatan Bhaksos dalam Pelayanan KB dalam Kegiatan Momentum (Bhakti IBI, Bhakti Sosial TNI, Kesatuan Gerak PKK, Harganas) dapat diarahkan pada pelayanan kesertaan ber KB baru dan kesehatan reproduksi (Papsmear) untuk pencapaian PPM.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan
 1. Standar Pelayanan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB. Materi ini diberikan kepada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pelayanan diantaranya Pengelolaan KB di Kota Dumai dan Bidan. Topik bahasan meliputi kegiatan konseling, penggunaan informed choice dan informed concent, prosedur pelayanan, serta prosedur pasca pelayanan.
 2. Pertemuan Tim Jaga Mutu pelayanan KB
Fokus bahasan dari kegiatan ini adalah Pencegahan Infeksi (PI) dalam Pelayanan KB. Manfaat dari kegiatan Jaga Mutu adalah dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan KB, penerimaan masyarakat terhadap pelayanan KB, serta antisipasi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari klien KB kepada pelaksana pelayanan.
 3. Kunjungan Tim specialist (MOW/MOP) Kegiatan ini terutama untuk melakukan pembinaan kompetensi para pelaksana pelayanan medis KB di Kota Dumai baik di Rumah Sakit maupun Pukesmas atau Klinik KB. Bentuk kegiatannya di fokuskan kepada bimbingan praktek pelayanan MOW dan MOP.
 4. Pertemuan Medis Teknis Yan Kontrasepsi Pertemuan medis teknis dilaksanakan dengan sasaran para tenaga medis (dokter

dan bidan) di Rumah Sakit dan Pukesmas atau Klinik KB. Fokus pembahasan adalah konsep dan standar medis teknis pelayanan KB, pelaksanaan medis teknis, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan KB, serta menilai hasil serta menyusun saran tindak lanjut pelayanan KB berkualitas.

5. Pertemuan Pengelolaan KB di RS/RSB.

Kegiatan ini dilakukan untuk memaksimalkan dan mempromosikan KB terutama pada Fasilitas Pelayanan di Rumah Sakit. Sehingga banyak PUS Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran mendapat pelayanan KB serta mengupayakan untuk meningkatkan pemahaman kepada keluarga/ masyarakat bahwa KB tidak saja bermanfaat bagi pengaturan kelahiran tapi juga bermanfaat bagi kesehatan ibu dan anak terutama Ibu yang melakukan persalinan di Rumah Sakit.

6. Pelatihan Medis Teknis (IUD, Implant, MOP dan MOW)

7. Pengadaan Informed Consent

8. Bantuan Komplikasi dan Kegagalan

Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya Pelayanan Program PPKB adalah

1. Strategi Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk;
2. Strategi pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk;
3. Strategi Sinergi semua program DPPKB Kota Dumai;
4. Strategi advokasi anggaran kepada pengambil kebijakan;
5. Strategi integrasi program;
6. Strategi pelayanan KB terpadu;
7. Strategi penguatan komitmen dengan jejaring mitra kerja dan stake holder;
8. Strategi propaganda KKB;
9. Strategi advokasi KKB;
10. Strategi jejaring kemitraan lintas sektoral;
11. Strategi program Pemberdayaan Keluarga (PK);
12. Strategi program KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR);

13. Strategi program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
14. Strategi program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas;
15. Strategi program Pengembangan Sistem Informasi data mikro keluarga;
16. Strategi penurunan angka kegagalan dan komplikasi pelayanan KB
17. Strategi penggarapan unmeet need di daerah khusus perkotaan dan sasaran khusus.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Ketika kita harus menghadapi berbagai masalah kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia yang masih harus terus ditingkatkan, dilain pihak masih banyak anggapan-anggapan yang justru menghambat penanganan masalah kependudukan. Anggapan-anggapan tersebut, antara lain adalah bahwa peledakan penduduk sudah berlalu karena program keluarga berencana berhasil; penduduk masa depan tidak perlu dipikirkan dan diarahkan karena prioritas saat ini adalah mengatasi masalah ekonomi dan pengadaan pangan; perdebatan dan diskusi masalah penduduk dan pembangunan sudah selesai; pertumbuhan penduduk saat ini tidak lagi menimbulkan masalah karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengatasi kebutuhan pertambahan penduduk; pemecahan masalah kependudukan hanya karena masalah kurang pendanaan; masalah kependudukan sudah jelas dan sudah dipahami oleh semua perencana dan pelaksana pembangunan; masalah kependudukan dapat dipisahkan secara tegas antar wilayah dan antar daerah; masalah kependudukan hanyalah masalah sosial dan kesejahteraan, tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ekonomi dan politik; dan berbagai anggapan lain yang tidak menguntungkan. Anggapan-anggapan ini berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan memperberat upaya pemecahan masalah-masalah kependudukan termasuk upaya pengendalian jaring pengaman sosial yang tengah dilakukan. Dari sisi pendapatan, angka pendapatan per kapita (income per capita) di Kota Dumai masih rendah. Keadaan tersebut dapat menurunkan kualitas penduduk, yang ditandai dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian, kekurangan gizi terutama pada masyarakat miskin, serta meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selain itu, terjadi penurunan

kesempatan belajar dan bekerja dan penurunan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup termasuk Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kondisi ini mengancam keberhasilan pembangunan penduduk dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan dalam menciptakan Sumber Daya Manusi (SDM) yang berkualitas. Upaya pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk perlu memperoleh perhatian serius sebab disamping jumlah pasangan usia subur yang terus meningkat, keberlanjutan program KB menjadi terancam karena kurang tertangani dengan serius. Disisi lain, penurunan angka kelahiran dan kematian yang cepat dimasa lalu mengundang permasalahan baru, yaitu terjadinya perubahan jumlah, struktur dan komposisi penduduk dengan cepat. Perubahan yang cepat itu perlu diimbangi dengan pengembangan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan dinamika kependudukan agar program-program pembangunan selanjutnya lebih terarah dan terkendali. Masalahnya adalah bahwa jika penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat terus ditingkatkan, maka dana yang ada akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan mobilitas dan persebaran penduduk sehingga akan meningkatkan kualitas penduduk dengan persebaran yang lebih seimbang. Selain masalah programatis tersebut diatas, perlu diperhitungkan pula berbagai hal yang berkaitan dengan bidang manajemen. Beberapa tantangan dalam bidang pengelolaan manajemen yang penting dan perlu diperhitungkan antara lain berupa tuntutan masyarakat akan manajemen pelayanan yang semakin berkualitas. Hal – hal seperti inilah yang perlu dilakukan lebih lanjut pada masa yang akan datang, agar masyarakat atau keluarga akan mengikuti program KB dengan sepenuh hati dan akhirnya dapat berperilaku positif dalam kesehatan reproduksi guna mewujudkan sumber daya manusia yang potensial. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai mempunyai kewenangan untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan kependudukan dalam bidang kuantitas, kualitas, mobilitas, dan informasi kependudukan yang dipakai sebagai acuan bagi semua sektor pembangunan termasuk DPPKB. Secara khusus, DPPKB mempunyai kewenangan untuk mengembangkan aksi social di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga serta pengembangan kuantitas

penduduk dan keluarga melalui pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Setelah dilakukan analisa situasi berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman maka dapat disintesis bahwa isu strategis yang dihadapi adalah

1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
2. Rendahnya kesadaran pasangan usia subur untuk ber KB
3. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Dumai diantaranya akibat migrasi masuk penduduk
4. Masalah KB merupakan masalah yang kompleks dan terintegrasi yang tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga upaya pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Pengalaman menunjukkan kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum membuahkan hasil yang optimal. Sehingga untuk dapat mencapai masyarakat sejahtera dan berkualitas tersebut sangat dibutuhkan koordinasi secara sektoral berdasarkan azas kemitraan dan kerja sama.
5. Pemberlakuan otonomi daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif yang mampu berkompetisi serta bertanggung jawab dan mempunyai pemikiran dalam menghadapi persaingan serta tantangan global di masa depan. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung berjalannya otonomi daerah dalam meningkatkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta menghadapi era persaingan bebas sebagai akibat globalisasi yang menimbulkan adanya pengaruh negative dari luar.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai masih belum maksimal. Pemerataan sarana dan prasarana serta pendistribusian tenaga penyuluh dalam upaya pemerataan keterjangkauan pelayanan masyarakat Dumai masih perlu ditingkatkan, khususnya agar dapat menjangkau daerah-daerah sulit. Untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat yang bermutu guna mewujudkan visi

dan misi maka masih diperlukan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Disadari bahwa alokasi dana pembangunan di daerah lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik termasuk infrastruktur maupun pembangunan perekonomian. Pembiayaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang mendapatkan alokasi dana yang memadai, hal ini dikarenakan hasil dan dampak dari pembangunannya tidak dapat diukur secara kasat mata dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Keadaan ini merupakan suatu ancaman terhadap upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat, untuk itu sangat dibutuhkan dukungan politis dan pembiayaan dari pemerintah daerah, lintas sektor dan swasta khususnya biaya operasional dalam upaya pelayanan kepada masyarakat (Public Good) .

Sesuai dengan Tujuan Umum Pembangunan Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Berkualitas dan Keikutsertaan Seluruh Keluarga dalam Program Keluarga Berencana dengan Melindungi Hak Reproduksi serta Meningkatkan Kualitas Manusia yang juga dapat turut menunjang pembangunan Kota Dumai, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dirumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.

Guna merumuskan isu-isu strategis dengan kata lain disebut sebagai persoalan utama, untuk selanjutnya dijadikan agenda dan perhatian utama penyelesaian permasalahan penyelenggaraan mandat pemerintah dalam kurun waktu tertentu.

Sisi internal memuat aspek kekuatan dengan batasan, bahwa seluruh kekuatan pada wilayah administrasi pemerintahan meliputi sumber daya manusia, keuangan daerah, sistem pelayanan, dan data informasi, serta teknologi. Lebih lanjut aspek kelemahan memiliki batasan seluruh kelemahan meliputi faktor sumber daya manusia, keuangan dan sistem pelayanan.

Sisi eksternal memuat aspek peluang dengan batasan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan mengakselerasi upaya

penyelesaian masalah dalam melaksanakan mandat pemerintahan. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya manusia, keuangan daerah, sistem pelayanan, data informasi, dan teknologi, pelanggan serta kebijakan. Aspek ancaman sebagaimana menjadi muatan pada sisi eksternal, memiliki batasan seluruh faktor yang menjadi ancaman dalam penyelenggaraan mandat pemerintahan meliputi pelanggan dan kebijakan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI

1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dijabarkan dari Misi adalah sebagai berikut :

“Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana”

1. Sasaran

Sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai adalah sebagai berikut :

“Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana”

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran/ Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.12	2.08	2.04	2.01	1,98
1.1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45.2	46.6	47.7	48.8	49.9
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	22.36	19.93	17.94	16.26	15.30
		IBANGGA (%)			59	60	61

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DUMAI

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengendalikan laju pertumbuhan Penduduk dalam Program Bangga Kencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Peningkatan Pelayanan KB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jaminan ketersediaan alokasi dan sarana penunjang 2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan KB 3 Pelayanan KB di wilayah masyarakat miskin (tidak mampu) 4 Pembinaan pelayanan KB swasta dan standarisasi 5 Sosialisasi, promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi
		Pembinaan Remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam menolak pernikahan dini 2 Peningkatan Pengetahuan

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Sikap dan Perilaku dalam menolak Pornografi dan Perilaku seksual menyimpang 3 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Perilaku dalam Menolak penggunaan narkoba
		Pembangunan Keluarga	1 Perwujudan kesadaran kolektif keluarga dalam program pengasuhan dan pembinaan keluarga berdasarkan siklus kehidupan 2 Peningkatan Pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 3 Pembinaan kesertaan ber KB bagi PUS anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
		Penguatan Advokasi dan KIE KB	1 Peningkatan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Program Bangga Kencana 2 Pembinaan Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader)

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Penguatan Kemitraan Penguatan Implementasi Program di Lini Lapangan (melalui Kampung KB)

Tabel 5.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

5.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.

5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 2. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 4. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data / informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 2. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 4. Peningkatan KB Pria.
 5. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 6. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
1. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan

strategi:

1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
2. Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DISDALDUK-KB KOTA DUMAI

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.723.806.646	100%	4.445.052.852	100%	5.554.816.787	100%	6.610.950.060	100%	6.610.950.060,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.799.500	3 Dokumen	17.799.500	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	40.795.922	3 Dokumen	40.795.922,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.799.500		17.799.500		50.000.000		40.795.922		40.795.922,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan			
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen										DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah			2.941.663.233	7 Dokumen	2.977.228.522	7 Dokumen	3.385.127.430	7 Dokumen	3.405.503.577	7 Dokumen	3.405.503.577,00		
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan										DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.860.823.333	24 Orang/bulan	2.896.388.622	28 Orang/bulan	3.266.324.160	30 Orang/bulan	3.295.721.078	33 Orang/bulan	3.295.721.078,00		

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	6 Laporan	30.000.100	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	40.360.000	6 Laporan	40.360.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	50.839.900	1 Dokumen	50.839.800	1 Dokumen	68.803.270	1 Dokumen	69.422.499	1 Dokumen	69.422.499,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada	1 Dokumen	1 Dokumen	19.590.000		19.589.900		36.452.397		30.270.000		30.270.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Perangkat Daerah													
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi Aset	1 Dokumen	1 Dokumen											
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			19.590.000	2 Laporan	19.589.900	2 Laporan	36.452.397	2 Laporan	30.270.000	2 Laporan	30.270.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.180.000	2 Dokumen	20.180.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		10.000.000		10.090.000		10.090.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket		1 Paket		1 Paket			

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal											DPPKB	Kota Dumai	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	50 Orang	10.000.000	55 Orang	10.090.000	60 Orang	10.090.000,00			
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan									DPPKB	Kota Dumai	
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			257.692.050	7 Dokumen	436.171.907	7 Dokumen	700.517.000	7 Dokumen	619.540.791	7 Dokumen			619.540.791,00
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan									DPPKB	Kota Dumai	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4.907.000	1 Paket	2.963.000	1 Paket	5.517.000	1 Paket	5.566.653	1 Paket			5.566.653,00

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	40.270.904	1 Paket	70.270.100	1 Paket	90.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	80.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.292.300	1 Paket	9.120.707	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.180.000	1 Paket	20.180.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.270.000	1 Paket	30.270.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	47.112.100		72.728.100		90.000.000		90.000.000		85.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket				
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan										DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			9.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.135.000	2 Dokumen	15.135.000,00		
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan										DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			137.109.746	1 Laporan	263.090.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	383.389.138	1 Laporan	383.389.138,00		
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23 Unit	275.208.000	47 Unit	410.073.360	52 Unit	1.535.357.881	57 Unit	1.535.357.882,00	DPPKB	Kota Dumai	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000,00		
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	125.208.000				1 Unit	131.000.000	1 Unit	131.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	157.809.660	22 Unit	739.312.881	25 Unit	739.312.882,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.045.000	1 Unit	5.045.000,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			21 Unit	150.000.000	45 Unit	247.263.700	50 Unit	510.000.000	55 Unit	510.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			321.033.300	330.465.460		635.000.000		537.896.470		537.896.470,00	DPPKB	Kota Dumai	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39 Laporan		39 Laporan		39 Laporan		39 Laporan				
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.170.000	12 Laporan	1.170.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	1.310.270	12 Laporan	1.310.270,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			107.463.300	12 Laporan	90.463.300	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	203.616.200	12 Laporan	203.616.200,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan												
		Jumlah penyediaan kebutuhan jasa	12 Bulan	12 Bulan	212.400.000,00		238.832.160,00		330.000.000,00		332.970.000		332.970.000,00	DPPKB	Kota Dumai	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		keamanan kantor														
		Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan												
		Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	12 Bulan	12 Bulan												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Unit	5 Unit												
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171.028.563	62 Unit	388.589.563		66 Unit	317.646.600		70 Unit	421.405.419	75 Unit	421.405.419,00	DPPKB

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	5 Unit	5 Unit	143.628.563	161.189.563	190.000.000	191.710.000	191.710.000,00	DPPKB	Kota Dumai				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		31 Unit								33 Unit	35 Unit	38 Unit	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	27.400.000	27.400.000	27.646.600	27.895.419	27.895.419,00	DPPKB	Kota Dumai				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit								32 Unit	34 Unit	36 Unit	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	201.800.000	1 Unit	201.800.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		yang Dipelihara /Direhabilitasi													
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	40%	40%	296.468.022	50,00 %	453.720.000	60,00 %	931.800.000	70,00 %	970.800.000	80,00 %	970.800.000,00	DPPKB	Kota Dumai
		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	50%	50%		51%		52%		53%		54%			
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana	32,50 %	32,50 %	204.119.950		304.920.000		780.000.000		819.000.000		819.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk															
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program Bangga Kencana)	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	50%	50%												DPPKB	Kota Dumai
					32.119.150	125.800.000	280.000.000	294.000.000	294.000.000,00								
						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Berencana)													
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	46 Institusi	46 Institusi	172.000.800	179.120.000	500.000.000	525.000.000	525.000.000,00	45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	92.348.072	2 Dokumen	148.800.000	2 Dokumen	151.800.000	2 Dokumen	151.800.000	2 Dokumen	151.800.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	88.800.000	1 Laporan	88.800.000	1 Laporan	88.800.000	1 Laporan	88.800.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000		-	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	42.600.000	1 Laporan	42.600.000	1 Laporan	42.600.000	1 Laporan	42.600.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	89.628.072	2 Dokumen	17.400.000	2 Dokumen	17.400.000	2 Dokumen	17.400.000	2 Dokumen	17.400.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per	2,56%	2,56%	2.737.936.298	2,54%	2.600.479.830	2,52%	2.234.853.000	2,50%	2.274.926.677	2,48%	2.274.926.677,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		WUS usia 15-49 Tahun													
		ASFR 15-19	14,00 %	14,00 %		12,67 %		11,30 %		10,00 %		9,80%	-		
		UKP	22 Usia	22 Usia		22 Usia		22 Usia		22 Usia		22 Usia	-		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6 Laporan	6 Laporan	713.995.000	6 Laporan	738.050.000	6 Laporan	458.259.000	6 Laporan	462.383.331	6 Laporan	462.383.331,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 Organisasi	12 Organisasi	4.375.000	12 Organisasi	57.400.000	12 Organisasi	57.916.600	12 Organisasi	58.437.849	12 Organisasi	58.437.849,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen 28.170.000			2 Dokumen 5.000.000			2 Dokumen 5.045.000			2 Dokumen 5.045.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen 67.470.000	4 Dokumen 150.000.000		4 Dokumen 100.000.000			4 Dokumen 100.900.000			4 Dokumen 100.900.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	294.840.000	12 Laporan	115.645.000	12 Laporan	116.685.805	12 Laporan	117.735.977	12 Laporan	117.735.977,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	283.500.000	12 Laporan	337.050.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.900.000	12 Laporan	100.900.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	35.640.000	2 Laporan	77.955.000	2 Laporan	78.656.595	2 Laporan	79.364.505	2 Laporan	79.364.505,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan	18 pkb/plkb	18 pkb/plkb	425.100.000	368.200.000	2 Laporan	616.594.000	2 Laporan	642.193.346	3 Laporan	642.193.346,00	DPPKB	Kota Dumai	
		Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				38.000.000	1 Organisasi	50.000.000	1 Organisasi	50.000.000	1 Organisasi	50.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	Jumlah PKB/PLKB yang melakukan penyuluhan	18 pkb/plkb	18 pkb/plkb	266.700.000	264.200.000		500.000.000		525.000.000		525.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%												
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			1 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		3 Laporan					

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	196 Orang	196 Orang	158.400.000	197 Orang	66.000.000	198 Orang	66.594.000	199 Orang	67.193.346	199 Orang	67.193.346,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<p>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p>	22,70 %	22,70 %	1.478.091.298	4 Laporan	1.376.729.830	4 Laporan	1.050.000.000	4 Laporan	1.059.450.000	4 Laporan	1.059.450.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	25.197.800		45.019.900		280.000.000		282.520.000		282.520.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12,40 %	12,40 %	446.849.300	1100 Orang	777.748.930	1164 Orang	280.000.000	1200 Orang	282.520.000	1226 Orang	282.520.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00 %	100,00 %	989.041.798	7 Unit	526.581.000	7 Unit	210.000.000	7 Unit	211.890.000	7 Unit	211.890.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah faskes yang melakukan pelayanan KB dan Kespro	25 Faskes	25 Faskes	17.002.400		27.380.000		280.000.000		282.520.000		282.520.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan		28 Laporan		28 Laporan		30 Laporan			
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Laporan	1 Laporan	120.750.000	1 Laporan	117.500.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.900.000	1 Laporan	110.900.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	8.300.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	7 Kampung	7 Kampung	120.750.000	7 Kampung	109.200.000	7 Kampung	100.000.000	7 Kampung	100.900.000	7 Kampung	100.900.000,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	75%	75%	829.799.912	78%	1.721.020.100	80%	1.125.741.511	82%	1.135.423.185	85%	1.135.423.185,00	DPPKB	Kota Dumai
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	61%	61%	829.799.912		1.721.020.100		1.125.741.511		1.135.423.185		1.135.423.185,00	DPPKB	Kota Dumai
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	86%	86%											
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	76%	76%											

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	79%	79%												
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan					
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			20 Unit	360.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000,00	DPPKB	Kota Dumai		
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	70%	70%	9.000.000	238.700.050		280.000.000		282.520.000		282.520.000,00	DPPKB	Kota Dumai		

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(UPPKS) yang ber-KB mandiri													
		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				155 Orang		126 Orang		133 Orang		140 Orang			
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	432 Orang	432 Orang	769.679.912	432 Orang	907.200.000	432 Orang	135.741.511	432 Orang	136.963.185	432 Orang	136.963.185,00	432 Orang	

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	76%	76%										DPPKB	Kota Dumai
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			10.500.000	5.000.050	280.000.000	282.520.000	282.520.000,00	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	81%	81%	40.620.000	110.120.000	280.000.000	282.520.000	282.520.000,00					DPPKB	Kota Dumai

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 2022)	Target Kinerja										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan			
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			33 Keluarga	100.000.000	33 Keluarga	100.000.000	33 Keluarga	100.900.000	33 Keluarga	100.900.000,00		DPPKB	Kota Dumai
JUMLAH					7.588.010.878		9.220.272.782		9.847.211.298		10.992.099.922		10.992.099.922,00		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2022-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.70	2.12	2.08	2.04	2.01	1.98	1.98
	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	75,50	45.2	46.6	47.7	48.8	49.9	49.9
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	13,20	22.36	19.93	17.94	16.26	15.30	15.30
	IBANGGA (%)	N/A			59	60	61	61

BAB VIII

PENUTUP

Upaya penguatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (**Bangga Kencana**) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian cukup tergambar pada kondisi pencapaian Program Bangga Kencana secara nasional selama lima tahun terakhir (Perubahan Renstra 2016-2021), dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai harus lebih meningkatkan komitmen bersama, dan lebih membangun kerjasama lintas sektor dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai 2021-2022.

Segala penajaman pada tujuan dan sasaran srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang diikuti dengan perumusan indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai 2021-2026 tentunya harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2020-2024, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan No. 5 (lima) untuk “meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (**Bangga Kencana**) yang telah direncanakan didalam dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi Program Bangga Kencana ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.